



## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Peran Aparatur Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sarani<sup>1</sup>, M. Titan terzaghi<sup>2\*</sup>, Fitriasuri<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia

E-mail: [saranirani18@gmail.com](mailto:saranirani18@gmail.com)<sup>1</sup>

### ARTICLE INFO

### ABSTRAK

#### Article history:

Received 10 September 2023

Received in Revised 08 Juni 2024

Accepted 10 Juni 2024

Keyword's : Taxpayers, Tax Sanctions, Village Apparatus, Compliance.

*This research aims to provide an understanding of taxpayer compliance with non-compliance in paying PBB. Research method used: Selection of population and sample using simple random sampling, using quantitative data. Meanwhile, the data sources are primary data and secondary data, with one dependent variable and three independent variables. Using analysis with quantitative descriptive statistical methods. Data quality testing was carried out using validity testing and reliability testing. Meanwhile, the next test uses multiple linear regression analysis, Partial Significance Test (t Test), Simultaneous Significance Test (F Test). The research results provide that tax knowledge has a positive and significant impact on taxpayer compliance in paying PBB. Tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance in paying PBB. And the role of village officials has a positive influence on taxpayer compliance in paying PBB. With the role of village officials, it will encourage higher levels of taxpayer compliance in paying PBB.*

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak terhadap ketidakpatuhan dalam membayar PBB. Metode penelitian yang dilakukan: Pemilihan populasi dan sampel dengan simple random sampling, menggunakan data kuantitatif. Sedangkan sumber data yaitu data primer dan data skunder, dengan variabel satu terikat (dependent) dan tiga variabel bebas (independen). Menggunakan analisis dengan metode statistik deskriptif kuantitatif. Uji kualitas data dilakukan dengan Uji validitas dan Uji Reliabilitas. Sedangkan pengujian selanjutnya menggunakan analisis regresi linier berganda, Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Uji Signifikansi Simultan (Uji F). Hasil penelitian memberikan pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Serta peran aparat desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan adanya peran dari aparat desa tersebut maka akan mendorong semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000 0000.

E-mail address: [saranirani18@gmail.com](mailto:saranirani18@gmail.com)

Peer review under responsibility of Expensive: Accounting Journal. 2829-5609.

## **PENDAHULUAN**

Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi negara. Sehingga pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, PBB dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur pendapatan serta belanja daerah (Napitupulu dan Budiarmo, 2015).

Berkaitan dengan penerimaan PBB yang diperoleh desa, masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya terutama rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang adalah kewajibannya. Rendahnya pengetahuan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan buruknya persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, sempurna dan keputusan yang adil. Adanya kondisi seperti ini tidak membuat wajib pajak untuk patuh membayar pajak tetapi menjadikan kecenderungan untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah besar dan serius bagi para pembuat dan pengamat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB. Siti (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014). Hasil penelitian Ablessy dkk (2020) bahwa sanksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib PBB.

Pentingnya masalah penerimaan PBB sehingga dilakukan penelitian di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB yang membuktikan ketidakpatuhan dalam membayar PBB sehingga sangat perlu pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak, hal ini dimaksudkan agar efektivitas penerimaan PBB khususnya di Desa Tanjung Pinang dapat berjalan dengan efektif. Penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan hubungannya dengan efektivitas penerimaan PBB.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir periode 2017-2020, (PBB) di Desa Tanjung Pinang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak dispenda yaitu 100 persen, pada tahun 2017 dispenda menetapkan target sebanyak 23.350.000 dan hasil yang dicapai hanya 3.750.000 dengan persentase 16.06%.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan meliputi: Pemilihan populasi dan sampel dengan simple random sampling (Arieska dan Novera, 2018). Dalam perhitungannya digunakan rumus **Slovin**, pada persamaan 1.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:  $n$  = Jumlah sampel  
 $N$  = Populasi  
 $e$  = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Variabel penelitian yang digunakan yaitu menggunakan satu variabel terikat (dependent) dan tiga variabel bebas (independent). Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), sedangkan variabel bebas (independen) terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif kuantitatif.

Pengujian kualitas data dilakukan dengan Uji validitas dan Uji Reliabilitas. Pengujian asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Analisis regresi linier berganda. Dengan Model uji analisis linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:  
 $Y$  = kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi pengaruh pengetahuan perpajakan  
 $\beta_2$  = Koefisien regresi sanksi pajak  
 $\beta_3$  = Koefisien regresi persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa  
 $X_1$  = Variabel pengaruh pengetahuan perpajakan  
 $X_2$  = Variabel sanksi pajak  
 $X_3$  = Variabel persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa  
 $e$  = Error (kesalahan regresi)

Uji hipotesis meliputi Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Uji Signifikansi Simultan (Uji F).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif.

Sebanyak 94 responden memberikan jawaban yang kemudian diolah data secara statistik dan didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.X <sub>1</sub>	94	11	20	17,36	2,078
Total.X <sub>2</sub>	94	12	20	17,44	1,811
Total.X <sub>3</sub>	94	12	20	17,24	1,824
Total.Y <sub>1</sub>	94	10	20	17,28	2,177
Valid N (list wise)	94				

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022*

Berdasarkan table 1 variabel Pengetahuan perpajakan (X<sub>1</sub>) memiliki skor minimum sebesar 11, skor maksimum 20 dengan rata-rata 17,36 serta standar deviasi sebesar 2,078. Sedangkan variabel Sanksi pajak (X<sub>2</sub>) memiliki skor minimum 12, skor maksimum 20 dengan rata-rata 17,44 serta standar deviasi 1,811. Variabel peran aparatur desa (X<sub>3</sub>) memiliki skor minimum 12, skor maksimum 20 dengan rata-rata 17,24 dan standar deviasi 1,824. Variabel kepatuhan membayar PBB (Y) memiliki skor minimum 10, skor maksimum 20 dengan rata-rata 17,28 serta standar deviasi 2,177.

### Hasil Uji Kualitas Data.

Hasil uji kualitas data meliputi Uji Validitas dan Uji Realibilitas. Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (Ghozali, 2012). Tabel 2. Menyajikan hasil uji validitas dalam penelitian ini. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel (0,207) dan bernilai positif. Sehingga pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Tabel 3 menunjukkan Data Uji Realibilitas untuk mengukur suatu kuesioner berupa indikator dari variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach* alfa  $>$  0,60 (Ghozali, 2016). Hasil menunjukkan pengujian ini dilakukan secara variabel bukan secara item pertanyaan yang dapat dilihat hasilnya adalah nilai *cronbach's* alfa lebih besar dari pada 0,6 maka dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	PP1	0.770	0.207	Valid
	PP2			
	PP3			
	PP4			
Sanksi pajak	SP1	0.747	0.207	Valid
	SP2			
	SP3			
	SP4			
Peran aparaturn desa	PAD1	0.700	0.207	Valid
	PAD2			
	PAD3			
	PAD4			
Kepatuhan membayar PBB	KMPBB1	0.644	0.207	Valid
	KMPBB2			
	KMPBB3			
	KMPBB4			

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022*

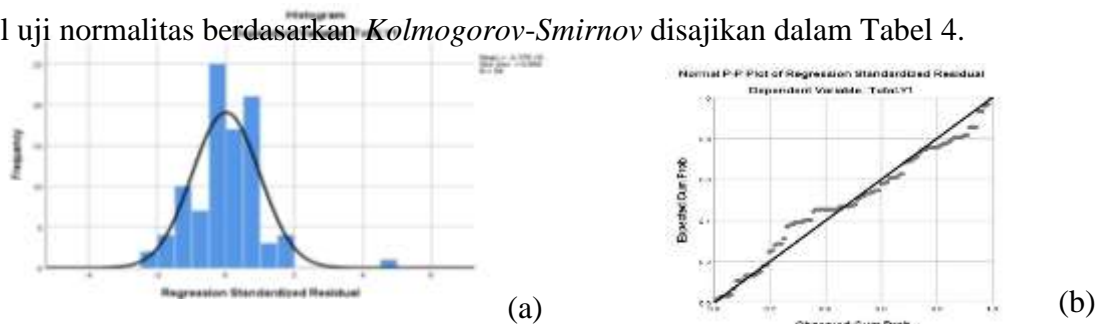
**Table 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alfa	Role of thumb	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,747	0,6	Reliabel
Sanksi pajak	0,65	0,6	Reliabel
Peran aparaturn desa	0,615	0,6	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	0,644	0,6	Reliabel

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022*

### Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara yang bisa ditempu untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan grafik normal P-P plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Jika pada tabel test of normality dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* nilai sig  $> 0.05$ , maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Adapun uji normalitas dalam penelitian ini disajikan dalam **Gambar 1 (a&b)**. sedangkan hasil uji normalitas berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov* disajikan dalam Tabel 4.



**Gambar 1. (a) Grafik Histogram Uji Normalitas; (b) Normal Probability**

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

<i>Asymp.sig</i>	Kriteria	Keterangan
0,172	> 0.05	Berdistribusi Normal

Berdasarkan grafik histogram residual menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna, Pada grafik normal P-P Plot residual penyebaran data ada dalam garis normal (garis lurus). Untuk memastikan residual data telah mengikuti asumsi normalitas, maka residual data diuji kembali dengan *Kolmogorov-smirnov* pada tabel, hasil menunjukkan data yang didapat mengikuti distribusi normal, berdasarkan hasil output menunjukkan nilai *Kolmogorov-smirnov* signifikan pada  $0,172 > 0,05$ .

### Uji Multikolinearitas.

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui adanya *multikolinearitas* dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance inflation faktor (VIF)* (Supriyadi et al., 2017). Hasil ini disajikan dalam Tabel 5 Hasil uji menunjukkan bahwa baik pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan peran aparatur desa memiliki nilai toleransi kurang dari 1 dan VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan data tidak mengalami multikolenieritas.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolenieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,186	5,380	Tidak terjadi multikolenieritas
Sanksi pajak	0,523	1,913	Tidak terjadi multikolenieritas
Peran aparatur desa	0,171	5,856	Tidak terjadi multikolenieritas

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022*

### Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Hasil uji yang diperoleh dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 6 Berdasarkan data menunjukkan bahwa pengujian ini menggunakan metode uji glejser yang nilainya dilihat dari t-sig. Pada variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, peran aparatur desa memiliki nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka dapat dikatakan data tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,285	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi pajak	0,532	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Peran aparatur desa	0,159	Tidak terjadi heteroskedastisitas

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022*

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta untuk menunjukkan arah variabel-variabel tersebut. Tabel 7 menunjukkan hasil Analisis Regresi berganda dari penelitian ini.

**Tabel 7. Analisis Regresi berganda**

Variabel	Koefisien $\beta$	Standar Error
Konstanta	-1.949	0.609
Pengetahuan perpajakan	0.562	0.065
Sanksi pajak	0.017	0.044
Peran aparatur desa	0.531	0.077

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan koefisien  $\beta$  merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dapat dihasilkan:

$$Y = 1.949+0.562+0.017+0.531+e..... (3)$$

Hasil persamaan regresi dan interpretasi dari analisis berganda adalah nilai konstanta (a) bertanda negatif yaitu -1.949, artinya apabila variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  sama dengan (0) maka variabel Y mengalami penurunan. Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  yaitu sebesar 0.562 berpengaruh positif terhadap variabel Y; nilai koefisien regresi variabel  $X_2$  0.017 berpengaruh terhadap variabel Y; dan nilai koefisien variabel  $X_3$  sebesar 0.531 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Nilai variabel  $X_1$  sebesar 0,562; variabel  $X_2$  sebesar 0.017; dan variabel  $X_3$  sebesar 0.531. Dalam hal ini  $0.562 > 0,531$  dan  $0.017$ , maka variabel  $X_1$  memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel Y

### **Uji Hipotesis**

Uji Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), Uji signifikan parsial (Uji t), dan Uji signifikan simultan (Uji F). Koefisien determinasi digunakan dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menggambarkan variasi variabel independent (Kuncoro, 2011). Nilai  $R^2$  yang kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, hasil uji ini

ditunjukkan dalam Tabel 8. Uji t digunakan untuk menguji signifikan antara konstanta dengan variabel independent, hasil uji ditunjukkan dalam Tabel 9. Sedangkan Uji f digunakan untuk menguji secara bersama-sama variabel independen untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap variabel dependen (Arianto dkk., 2018), hasil uji ditunjukkan dalam Tabel 10.

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R square	Adjusted R square	Std. Error of the estimate
1	<b>.967<sup>a</sup></b>	0.936	0.934	0.560

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai pada kolom *adjusted square* maka nilai *adjusted square*nya yaitu 0.934 yang berarti pengaruh antara variabel X dan Y yaitu sebesar 93,4%.

**Tabel 9 Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Variabel	T hitung	T tabel	Sig
Pengetahuan perpajakan(X)-Kepatuhan membayar PBB(Y)	28.343	1.986	0.00
Sanksi Pajak(X)-Kepatuhan membayar PBB(Y)	8.799	1.986	0.00
Peran Aparatur desa(X)-Kep.membayar PBB(Y)	7.385	1.986	0.00

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022

Pengaruh pengetahuan perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dari tabel 4.10 terlihat pada tabel pengetahuan perpajakan nilai t hitung sebesar 28,343 sedangkan nilai t tabel 1,986 jadi t hitung (28,343) > t tabel (1,986) dan nilai sig ( 0.00) < 0.05 maka ho ditolak. Artinya ada pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi pajak (X<sub>2</sub>) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dari tabel 4.9 terlihat pada tabel sanksi pajak nilai t hitung sebesar 8,799 sedangkan nilai t tabel 1,986 jadi t hitung (8,799) > t tabel (1,896) dan nilai sig (0,00) < 0,05 maka ho ditolak. Artinya ada pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Peran aparatur desa (X<sub>3</sub>) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dari tabel peran aparatur desa nilai t hitung sebesar 7,835 sedangkan r tabel 1,986, Jadi t hitung (7,835) > t tabel (1,986) dan nilai sig (0,00) < 0.05 maka ho ditolak. Artinya ada pengaruh antara peran aparatur desa dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**Tabel 10 Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Model	Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig.
1 Regression	412.535	3	137.512	437.729	<b>.000<sup>b</sup></b>
Residual	28.273	90	0.324		
Total	440.809	93			

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian statistic f bahwa nilai signifikan (sig). Sebesar 0.000 yaitu  $< 0.05$  maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), Sanksi pajak ( $X_2$ ), dan peran aparaturnya ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB(Y).

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.**

Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar  $0.00 < 0.05$ , dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, ini sejalan dengan teori atribusi “bahwa seorang melakukan sesuatu karena dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal”. Pengetahuan adalah sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak terkait dengan PBB yang didapatkan dari buku ataupun selebaran yang disebar oleh petugas pajak bahkan bisa saja berasal dari informasi dari orang ke orang, satu hal yang dapat menunjang pengetahuan secara efektif adalah sosialisasi tentang PBB. Sehingga, ketika pengetahuannya membaik maka akan berdampak pada kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Mumi dkk., (2020), Siti Salmah (2018), dan Meylita dkk., (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB**

Variabel sanksi pajak mempunyai nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$ , yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Ini dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Penerapan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi wajib pajak. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sondakh dkk., (2020), Erawati dkk., (2017) dan Andrew dkk., (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## **Peran Aparatur Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB**

Variabel peran aparatur desa mempunyai nilai signifikan sebesar  $0.00 < 0.05$ , dapat disimpulkan bahwa peran aparatur desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Peran aparatur desa dalam meningkatkan kepatuhan pajak dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian terhadap wajib pajak terkait PBB. Hal ini berarti jika semakin tinggi peran aparatur desa maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian Aprizal dkk., (2019) juga menyatakan bahwa peran aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan di daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan ditentukan oleh masing-masing kelurahan. Dengan demikian faktor sanksi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dan peran aparatur desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya peran dari aparat desa tersebut maka akan mendorong semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya saran untuk pemerintah khususnya di kabupaten ogan ilir diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi pajak ataupun dengan memberikan informasi berupa gambaran mengenai manfaat pajak yang dipungut dari wajib pajak sehingga bisa tercapainya pembayaran pajak menimbulkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dapat memperketat penerepan sanksi denda sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar tidak ada lagi keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak. Untuk para peneliti selanjutnya kiranya dapat bisa memberikan manfaat lebih untuk kedepannya. Seperti menambah beberapa variabel tambahan sehingga dapat memberikan variasi jawaban, diharapkan memperluas obyek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran pemungutan PBB dengan skala yang lebih luas

## DAFTAR PUSTAKA

- Ablessy, M., Jullie, J. Sondakh, I Gede S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Andrea, M., W., Parera, Teguh, E. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- Andrew, Aprizal, Akbar, B., Mirfan. (2019). Peran Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Arianto, A., Abid M., Haris B. I., Ruswaji, Henny M. (2018). Determinasi Pelatihan, Motivasi, Gaji, dan Kompensasi Untuk Produksi (Studi Kasus Pada CV Anugrah Walet Indonesia), *Sentralisasi* 7(2), 1-10.
- Arieska, P., K., Novera, H., (2018), Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif. *Jurnal Statistika* 6(2).
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2.0. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, M. (2011). Metode kuantitatif. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu.
- Napitupulu, L. S., & Budiarmo, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah.
- Siti, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Siti, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- Supriyadi, E., Mariani, S. & Sugiman. (2017). Perbandingan Metode Partial Least Square (PLS) dan Principal Component Regression (PCR) untuk Mengatasi Multikolinearitas pada Model Regresi Linear Berganda. *Unnes Journal of Mathematics* 6(2), 117-128.
- Torgler, B. (2005). Tax Morale and direct Democracy. *European Journal Of Political Economy* 21, 525-531.
- Widiastuti, R., Herry, L. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *ISSN (online): 2337-3806* 3(2),1.